

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdiri dari tiga sektor yang dikenal sebagai “Tiga Pilar Ekonomi” yang berperan sebagai roda penggerak perekonomian nasional. Ketiga pilar tersebut dikenal sebagai, sektor koperasi, sektor negara (BUMN) dan sektor swasta. Menurut (Marsaoly I. , 2016) secara substansial sektor koperasi adalah gerakan rakyat untuk memberdayakan dirinya. Sehingga, koperasi akan tumbuh dari bawah (*bottom-up*) sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Hal ini didukung dengan tujuan koperasi sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, bahwa Koperasi mempunyai fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional. Melihat pentingnya peran koperasi tersebut, maka sudah pasti koperasi diharapkan bisa memberikan perannya dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat Indonesia.

Saat ini perkembangan koperasi di Indonesia sedang meningkat pesat, sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM).

Tabel I.1
Rekapitulasi Data Koperasi Nasional

No.	Data Koperasi Nasional	Tahun			Kenaikan (%)
		2012	2013	2014	2012-2014
1	Koperasi (Unit)	194,295	203,701	209,488	4%
2	Anggota (Orang)	33,869,439	35,258,176	36,443,953	4%
3	Volume Usaha (Rp. Juta)	119,182,690	125,584,976	189,858,672	30%
4	Modal Sendiri (Rp. Juta)	51,422,621	89,536,291	105,800,830	53%
5	Modal Luar (Rp. Juta)	51,403,537	80,840,572	94,861,987	42%
6	SHU (Rp. Juta)	6,661,926	8,110,180	14,898,647	62%

Sumber: Data diolah oleh penulis (2016)

Selama tiga tahun terakhir koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup memuaskan dengan bertambahnya unit koperasi secara nasional. Bertambahnya jumlah anggota dan modal dari luar terhadap koperasi juga menunjukkan bahwa saat ini minat masyarakat terhadap koperasi juga sedang meningkat secara konsisten. Dilihat dari segi segi volume usaha, koperasi di Indonesia juga sedang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan peningkatan pada dua tahun terakhir yang cukup tajam.

Data tersebut secara kuantitas menunjukkan koperasi di Indonesia sedang mengalami peningkatan dari segala sisi, namun secara makro kita belum melihat kontribusi koperasi pada perekonomian nasional. Menurut (Marsaoly I. , 2016) sampai saat ini belum pernah ada kisah sukses koperasi menjadi peran utama dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebanyakan koperasi belum sepenuhnya mampu mengembangkan aspek

usahanya pada sektor-sektor yang ada di masyarakat dan juga belum mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Secara global koperasi di Indonesia juga belum berhasil bersaing dengan koperasi dengan negara lain. Berdasarkan data *International Cooperative Alliance* (ICA) 2015, koperasi Indonesia masih tertinggal jauh dengan koperasi di negara lain jika dibandingkan dengan jumlah volume omset yang dimiliki. Arla Foods merupakan salah satu contoh koperasi terbaik berdasarkan omset dari 300 koperasi yang masuk ke dalam data ICA tersebut. Arla Foods menduduki peringkat 47 dengan omset yang mencapai hingga 130 triliun. Kunci kesuksesan Arla Foods adalah konsistensinya terhadap pelaporan kinerja pengurus terhadap anggota melalui laporan keuangan sejak tahun 1999. Konsistensi pelaporan inilah yang harus dicontoh oleh manajemen koperasi di Indonesia.

Salah satu permasalahan yang terjadi pada koperasi di Indonesia adalah permasalahan yang berkenaan dengan lemahnya sistem pelaporan keuangan yang ada, dan juga lemahnya sumber daya manusia, sehingga menyebabkan sering terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan dana keuangan koperasi (Yuhertiana & Donny, 2009). Sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas koperasi di Indonesia, pemerintah sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (KUKM) No. 20 Tahun 2015 menerapkan akuntabilitas koperasi di Indonesia demi mewujudkan koperasi yang akuntabel. Sistem akuntabilitas koperasi dilakukan oleh setiap koperasi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada

Rapat Anggota dan Pemerintah. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah demi mendukung peningkatan usaha dan pelayanan koperasi terhadap anggota masyarakat.

Salah satu indikator penerapan akuntabilitas aspek keuangan koperasi meliputi transparansi pengelolaan sistem akuntansi, serta kelengkapan dan dokumentasi proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi dibutuhkan pihak-pihak seperti anggota koperasi, atau pemberi modal dari luar koperasi untuk pertimbangan membuat keputusan ekonomis. Bagi anggota koperasi laporan keuangan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan hasil kinerja pengurus selama satu periode koperasi kepada seluruh anggotanya yang timbul akibat terjadinya pelimpahan wewenang kepada pengurus yang direfleksikan dalam penyampaian laporan keuangan (Januarti, 1998).

Pada realitasnya informasi akuntansi yang disajikan oleh manajemen merupakan informasi yang bersifat sepihak, sehingga informasi yang dihasilkan akan memiliki kecenderungan mengandung informasi yang bias karena informasi tersebut dihasilkan dari lingkungan yang dilingkupi banyak kepentingan. Padahal, informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan harus andal dan dapat dipercaya, sehingga keputusan yang diambil tepat dan akurat (Desriani, 2003). Oleh karena itu, dibutuhkanlah audit eksternal. Audit eksternal dilakukan untuk mengetahui apakah informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan telah lengkap, akurat dan tidak memihak pihak tertentu, para pihak pembuat keputusan dapat mencari tahu keandalannya

melalui audit eksternal (Elderet *al.*, 2009:8). Sebuah koperasi dinyatakan berhasil menerapkan akuntabilitas keuangan apabila laporan keuangannya selama dua tahun berturut-turut telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa catatan atau wajar dengan catatan yang tidak material. Jika koperasi telah dinilai berhasil menerapkan akuntabilitas, maka koperasi tersebut dapat diikutsertakan dalam penilaian koperasi berprestasi oleh Kementerian KUKM.

Menurut (Ardiansyah, 2009) audit independen (audit eksternal) sangat berperan penting untuk meningkatkan efisiensi dan integritas karyawan serta memperbaiki pengendalian dan efisiensi organisasi. Melalui audit eksternal kecurangan dan inefisiensi dapat dicegah karena karyawan akan berusaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *error* pada saat melakukan pencatatan akuntansi (Boyton dan Raymond, 2006:21). Selain itu, auditor dalam pelaksanaan audit eskternal akan memberikan sugesti untuk meningkatkan pengendalian internal perusahaan, mengevaluasi penilaian risiko yang dihadapi oleh manajemen dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Mengingat pentingnya audit eksternal dalam mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha, tentu koperasi yang merupakan sebuah bagian dari usaha perekonomian di masyarakat harusnya secara rutin menggunakan jasa audit eksternal untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitasnya. Namun, pada kenyataannya tidak semua koperasi secara sukarela melakukan audit oleh eskternal. Kecenderungan koperasi untuk memilih diaudit bisa dipengaruhi

oleh beberapa faktor lain (Sary *et al.*, 2014). Menurut Boyton dan Raymond (2006:20-21) kebutuhan akan eksternal audit sebuah perusahaan terhadap laporan keuangannya dapat disebabkan oleh 4 (empat) kondisi sebagai berikut, yaitu: perbedaan kepentingan (*conflict of interest*), konsekuensi (*consequence*), kompleksitas usaha (*complexity*), dan terakhir adalah pengendalian (*remoteness*). Keempat kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap risiko informasi, dimana risiko tersebut bisa saja laporan keuangan menjadi salah penyajiannya, tidak lengkap atau bahkan bias. Oleh karena itu, dapat dikatakan laporan keuangan yang telah diaudit dapat menyediakan *reasonable assurance* (keyakinan yang memaadai) dan kredibilitas informasi yang terdapat di dalamnya (Sanusi *et al.*, 2012).

Conflict of interest atau konflik keagenan dapat terjadi antara manajemen dengan para pihak yang menggunakan laporan keuangan (Wahyuningsih dan Jumawan, 2009). Pihak-pihak pengguna laporan keuangan tersebut adalah pemegang saham, kreditur, maupun pemerintah sebagai pembuat peraturan. Sanusi *et al.*, (2012) juga mengatakan alasan sebuah perusahaan skala kecil melanjutkan untuk diaudit adalah untuk membantu mengendalikan konflik keagenan antara manager, pemegang saham dan kreditur. Pada koperasi, konflik kepentingan antara setiap agen tersebut dapat terjadi karena adanya pemisahan tugas antara anggota dan pengurus koperasi yang menimbulkan fenomena berupa manipulasi laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi (Paramita & Ery, 2014).

Laporan keuangan merupakan cerminan informasi penting dan untuk beberapa kasus yang terjadi laporan keuangan merupakan satu-satunya sumber informasi yang berguna untuk membuat keputusan peminjaman, investasi dan keputusan lainnya (Boyton dan Raymond, 2006:21). Beberapa bank pemberi pinjaman sebagai pengguna eksternal laporan keuangan, akan menggunakan informasi yang terdapat pada laporan keuangan sebagai jaminan atas keamanan kredit yang telah diberikan kepada pihak peminjam. Alasannya adalah karena pihak bank akan lebih mempercayai keandalan laporan keuangan yang telah diaudit (oleh auditor eksternal) untuk menghindari risiko tidak kembalinya pinjaman tersebut, konsekuensi tersebutlah yang menyebabkan jumlah kewajiban yang dimiliki dapat mempengaruhi permintaan audit eksternal. Karena jika kreditur akan mendasarkan keputusannya pada laporan keuangan yang tidak diaudit maka akan terjadi kemungkinan kerugian finansial (Taurigana & Clarke, 2000).

Berkaitan dengan jumlah kewajiban, ketika semua badan usaha memiliki risiko utang beredar, manajer memiliki dorongan untuk melakukan aktifitas investasi kegiatan produksi pembiayaan investasi, yang akan menguntungkan dirinya dengan mengorbankan pemegang obligasi. Menurut Watts (1977) dalam Taurigana & Clarke (2000) dengan meningkatnya proporsi utang pada modal perusahaan, manajer akan memiliki dorongan lebih kuat untuk melakukan transfer kekayaan dari kreditur. Hal tersebut masih berkaitan dengan adanya perbedaan konflik kepentingan yang timbul antara pihak internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Pada koperasi konflik

kepentingan tersebut juga dapat terjadi pada koperasi pada situasi dimana pengurus koperasi menggunakan aktivitas investasi atau pembelanjaan dengan menggunakan dana pinjaman yang berasal dari kreditur, sesuai dengan pernyataan Chow (1982). Perusahaan yang memiliki proporsi rasio utang terhadap modal yang tinggi memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan audit (Taurinana & Clarke, 2000). Hal sebagai risiko untuk menghindari terjadinya transfer kekayaan yang berasal dari kreditur yang dilakukan oleh anggota koperasi.

Keadaan selanjutnya yang mempengaruhi permintaan audit eksternal sebuah badan usaha adalah kompleksitas usahanya. Hal tersebut disebabkan semakin meningkatnya tingkat kompleksitas usaha, maka akan semakin meningkat pula risiko *misinterpretation* dan tingkat kesalahan yang terjadi baik kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, seperti yang dikatakan Boyton dan Raymond (2006:21). Begitu juga dengan koperasi, semakin besar skala koperasi mencerminkan bahwa usaha yang dikelola mempunyai potensi untuk menjadi sangat kompleks karena transaksi yang dilakukan semakin rumit serta timbulnya permasalahan yang semakin beragam. Sehingga menurut (Januarti & H. Mohamad, 2006) jasa eksternal audit sangat dibutuhkan untuk membantu menyajikan laporan keuangan menjadi lebih valid dan membantu memecahkan masalah yang timbul akibat kompleksitas transaksi yang ada. Selain itu, ukuran perusahaan juga akan menyebabkan pemilik dalam sebuah badan usaha akan semakin sulit untuk mengawasi dan mengetahui keadaan usahanya tersebut, sehingga permintaan

audit eksternal akan dibutuhkan sebagai kompensasi atas hilangnya kontrol pemilik terhadap perusahaannya (Carey, *et al.*, 2000) (Abdel-Khalik, 1983).

Jumlah anggota koperasi juga akan mempengaruhi permintaan audit eksternal, hal tersebut ditunjukkan melalui peraturan yang diterapkan koperasi saat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bahwa setiap anggota memiliki hak satu suara dalam melakukan musyawarah untuk mufakat ataupun saat pengambilan suara. Sehingga semakin banyaknya suara atau pendapat, maka akan menyebabkan semakin beragamnya wawasan dan kepentingan yang dimiliki oleh setiap anggota koperasi (Januarti & H. Mohamad, 2006). Jasa akuntan publik dibutuhkan untuk menengahi adanya perbedaan kepentingan tersebut. Pengguna laporan keuangan, dalam hal kasus ini adalah anggota koperasi sudah tentu akan mencari jaminan dari independen auditor bahwa laporan keuangan telah bebas dari bias manajemen.

Berdasarkan pencarian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah koperasi di Indonesia untuk menggunakan jasa audit eksternal masih minim, yaitu Indira (2006) serta Ardiansyah (2009) pada koperasi di Semarang, Lisa (2011), Paramita dan Ery (2014) pada koperasi di kabupaten Lumajang dan Rafika (2009). Sehingga, membuat penulis tertarik untuk menambah penelitian empiris terhadap topik ini untuk diteliti kembali, tetapi dengan studi empiris pada koperasi dengan kelompok usaha simpan pinjam pada wilayah geografis yang berbeda.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang dapat mempengaruhi sebuah badan usaha koperasi untuk menggunakan jasa eksternal audit, yaitu:

- 1) Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan memiliki kecenderungan mengandung informasi yang bias karena dihasilkan dari lingkungan yang dilingkupi oleh berbagai kepentingan;
- 2) Konflik kepentingan yang timbul pada sebuah badan usaha adalah konflik antara manajer, pemegang saham serta kreditur, sedangkan pada koperasi konflik yang timbul antara pengurus, serta anggota koperasi, dan kreditur;
- 3) Konflik kepentingan antara anggota dan pengurus koperasi dapat menyebabkan manipulasi laporan keuangan;
- 4) Konflik kepentingan dapat timbul juga ketika perusahaan memiliki risiko utang beredar, dan manajer memiliki dorongan untuk melakukan aktifitas investasi kegiatan produksi pembiayaan investasi yang berasal dari pemberi pinjaman;
- 5) Ukuran koperasi yang semakin besar akan mempengaruhi tingkat kompleksitas transaksi dan permasalahan usahanya, sehingga dapat meningkatkan risiko salah interpretasi dan kesalahan pencatatan;
- 6) Jika kreditur mendasarkan keputusannya pada laporan keuangan yang tidak diaudit maka akan terjadi kemungkinan kerugian finansial;

- 7) Walaupun audit eksternal memberikan banyak manfaat bagi perkembangan usahanya, tidak semua koperasi secara sukarela melakukan audit eksternal;
- 8) Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan audit, masih belum banyak dilakukan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka peneliti akan membatasi penelitian ini hanya pada menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan audit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang terdapat di DKI Jakarta, dengan menggunakan variabel skala koperasi, jumlah kewajiban, dan rasio *gearing* atau proporsi utang jangka panjang terhadap modal.

D. Perumusan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah beserta pembatasan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini berupaya menambahkan pengembangan dari penelitian terdahulu, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah skala koperasi mempengaruhi permintaan jasa audit eksternal pada Koperasi?
- 2) Apakah jumlah kewajiban mempengaruhi permintaan jasa audit eksternal pada Koperasi?
- 3) Apakah *gearing* rasio mempengaruhi permintaan jasa audit eksternal pada Koperasi?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a) Menambah literatur untuk penelitian selanjutnya.
 - b) Menambah pengetahuan di bidang akuntansi.
- 2) Kegunaan Praktis
 - a) Akademisi, mengembangkan model penelitian yang terbaru.
 - b) Instansi koperasi, langkah dalam melakukan pembinaan koperasi
 - c) Profesi Akuntan Publik, memperluas bidang usaha dan menambah pemahaman terhadap badan usaha Koperasi.